

Dalam Negeri (PDN) netto, yang akan mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah, utamanya program dan kegiatan yang didanai dari dana perimbangan Tahun Anggaran 2021.

### **3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah, dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

a. Belanja daerah difokuskan pada prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 (sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2021) yaitu dalam rangka pemulihan perekonomian daerah yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19, dengan alokasi anggaran yang memadai untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, dengan prioritas:

- 1) Penanganan Kesehatan/hal terkait Kesehatan
- 2) Penanganan Dampak Ekonomi, agar dunia usaha tetap hidup
- 3) Penyediaan Jaringan Pengaman Sosial

Pada Tahun Anggaran 2021, anggaran untuk penanganan dampak Pandemi Covid-19 terdiri dari :

- 1) Penanganan kesehatan dialokasi anggaran sebesar Rp. 92.841.815.000,00.
- 2) Penanganan Dampak Ekonomi, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 109.950.913.466,00
- 3) Jaringan Pengamanan Sosial dialokasikan sebesar Rp. 17.339.722.900,00

b. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 yang diselaraskan dengan pembangunan jangka menengah daerah.

Pada Tahun Anggaran 2021, dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klaten terhadap capaian prioritas

Provinsi Jawa Tengah meliputi :

1. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran dialokasikan anggaran Rp. 14.095.411.575,00
  2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing dialokasikan anggaran Rp. 387.071.250.953,00
  3. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup, pengurangan resiko bencana, dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dialokasikan anggaran Rp. 111.707.876.457,00
- c. Belanja daerah difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada Tahun Anggaran 2021, alokasi anggaran untuk :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dialokasikan anggaran Rp. 332.924.074.621,00
  2. Pelayanan Publik dialokasikan anggaran Rp. 1.176.916.918.308,00
  3. Peningkatan Ekonomi Lokasi dan Iklim Investasi dialokasikan anggaran Rp. 16.176.270.886,00
- d. Belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.
- e. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan juga Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.